



**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERAPAN PERSIDANGAN
PERKARA PIDANA SECARA ELEKTRONIK DALAM SITUASI
PANDEMI COVID-19**

TESIS

ABDUL MUKTI

1910622022

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
2021**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan secara benar:

Nama : Abdul Mukti

NIM : 1910622022

Tanggal :

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan saya ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 31 Juli 2021

Yang Menyatakan,



Abdul Mukti

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Negeri Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdul Mukti
NIM : 1910622022
Fakultas : Hukum
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Nonexclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERAPAN PERSIDANGAN PERKARA
PIDANA SECARA ELEKTRONIK DALAM SITUASI PANDEMI COVID-19**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti ini Universitas Negeri Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 31 Juli 2021

Yang menyatakan,



Abdul Mukti

PENGESAHAN

Tesis diajukan oleh:

Nama : Abdul Mukti
NIM : 1910622022
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis : Analisis Yuridis terhadap Penerapan Persidangan Perkara
Pidana Secara Elektronik Dalam Situasi Pandemi Covid-19

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Ilmu HUKUM, Universitas Negeri Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.



Dr. Abdul Halim, M.Ag.
Ketua Penguji

Dr. Slamet Tri Wahyudi, S.H., M.H.
Penguji I

Dr. Supardi, S.H., M.H.
Penguji II/Pembimbing

Dr. Abdul Halim, M.Ag.
Dekan

Dr. Beniharmoni Harefa, S.H., L.L.M.
Ka. Prodi

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal Ujian : 27 Juli 2021

Abstrak

Pandemi COVID-19 telah menyebabkan perubahan tatanan dan pola kehidupan manusia dengan menerapkan kehidupan normal baru (*new normal*). Salah satu yang terkena imbas adalah sektor penegakan hukum di Indonesia. Penegakan hukum pidana pada akhirnya menerapkan melakukan penyesuaian, terutama pada saat melakukan pemeriksaan perkara di pengadilan yaitu dengan melakukan persidangan secara elektronik. Hal ini sebagai langkah untuk menerapkan protokol kesehatan demi menjaga keselamatan manusia. Hanya saja ketentuan mengenai hal ini belum ada pengaturan, di mana KUHAP hanya mengatur metode tatap muka secara langsung, sehingga MA mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) untuk menjadi pelaksanaan persidangan jarak jauh secara elektronik (*online*). Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan sidang perkara pidana secara empiris selama pandemic COVID-19 serta tinjauan yuridis terkait penerapan sidang elektronik berdasarkan PERMA ditinjau dari perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) berupa pandangan serta doktrin yang berlaku, pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Hasil dari penelitian menyatakan bahwa penerapan sidang elektronik memberikan kontribusi positif dalam penegakan hukum di Indonesia, tetapi tetap menghadapi sejumlah permasalahan. Dari konteks pengaturan, PERMA merupakan produk hukum yang berlaku mengikat dan memiliki kekuatan hukum. Hanya saja pengaturan persidangan secara elektronik ini perlu dinaikkan levelnya menjadi undang-undang sehingga memiliki kesejajaran dengan KUHAP, atau setidaknya dapat diusulkan kepada Presiden untuk diterbitkan menjadi Perppu.

Kata kunci: pandemi covid-19, persidangan elektronik, perundang-undangan

Abstract

The COVID-19 pandemic has caused changes in the order and pattern of human life by implementing a new normal life. One of those affected is the law enforcement sector in Indonesia. Criminal law enforcement ultimately implements making adjustments, especially when examining cases in court, namely by conducting virtual trials. This is a step to implement health protocols to maintain human safety. It's just that there is no regulation regarding this matter, where the Criminal Procedure Code only regulates by directly face-to-face method, so that the Supreme Court issues a Supreme Court Regulation (PERMA) to be the implementation of electronic remote trials (virtual). The problem raised in this study is how to apply the trial of criminal cases empirically during the COVID-19 pandemic as well as a Juridical review related to the virtual application courts based on PERMA in terms of the perspective of laws and regulations in Indonesia. This study uses a juridical empirical conceptual approach (conceptual approach) in the form of prevailing views and doctrines, statutory approach (statute approach), historical approach (historical approach), case approach (case approach), and comparative approach (comparative approach). The results of the study stated that the application of the virtual trial made a positive contribution to law enforcement in Indonesia, but still the implementation still has any problems. From the regulatory context, PERMA is a legal product that is binding and has legally force. It's just that this virtual trial arrangement needs to be leveled up to become a law so that it has parallels with the Criminal Procedure Code, or at least it can be proposed to the President to be issued as a Perppu.

Keywords: covid-19 pandemic, electronic trial, laws and regulations

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya hingga masih diberikan kesehatan hingga saat ini. Shalawat dan salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Atas berkat rahmat Allah pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik Dalam Situasi Pandemi Covid-19.”

Adapun maksud dari penulisan tugas akhir ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat yang telah ditentukan guna mencapai gelar Magister pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta. Begitu banyak tantangan yang harus dihadapi oleh penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, namun atas bimbingan Allah SWT dan berkat doa serta semangat dari keluarga, saudara, sahabat, terutama kepada dosen pembimbing serta dosen lainnya hingga penulis tetap berusaha untuk menyelesaikan tugas akhir ini hingga tuntas. Oleh karenanya, ucapan terima kasih tak terhingga disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tugas ini.

Ucapan terima kasih terutama diperuntukkan bagi Ibunda Sukamti dan ayahanda Zainal Abidin (alm) yang dengan begitu tulus terus memberikan doa dan semangat kepada penulis, semoga menjadi amal jariyah bagi keduanya. Begitu pula kepada istri tercinta, Annisa Husnul Khotimah, dan anak-anak tersayang, Fathiya Shafa Kamila, Nayla Mutia Salsabila, dan Muhammad Syamil Fauzan Adzima yang terus memberikan doa dan semangatnya sehingga menjadikan pemantik semangat bagi penulis untuk menyelesaikan tesis ini.

Selama penulisan tugas akhir ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, bantuan dan pengarahan dari berbagai pihak. Maka dengan ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Abdul Halim, M.Ag, selaku Dekan FH UPNVJ, Dr. Beni Harmoni Harefa, S.H., LL.M., selaku Ka.prodi dan Dr. Slamet Tri Wahyudi, S.H., M.H. serta

seluruh dosen dan pengurus Prodi Magister Hukum FH UPNVJ yang tanpa kenal lelah menyelenggarakan proses belajar mengajar hingga membantu penyelesaian tugas akhir;

2. Terkhusus kepada Dr. Supardi, S.H., M.H. selaku pembimbing yang telah begitu sabar memberikan bimbingan meskipun di tengah kesibukan yang dijalani sehari-harinya;
3. Rekan-rekan mahasiswa Magister Hukum FH UPNVJ Angkatan Tahun 2019 yang senantiasa saling membantu dan selalu menemani dalam proses belajar;
4. Seluruh rekan-rekan pada Biro Pengawasan Perilaku Hakim, Komisi Yudisial yang turut membantu doa dan semangat serta memberikan pengertian di antara rutinitas pekerjaan.

Semoga Allah SWT menjadikannya sebagai amal kebaikan untuk kita semua, dan menjadikan pula ilmu yang bermanfaat bagi penulis yang masih dalam tahap belajar.

Jakarta, 31 Juli 2021

Penulis,



Abdul Mukti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix

BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Manfaat Penelitian.....	9
1.5. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual	10
1.5.1. Kerangka Teoritis.....	11
1.5.1.1. Teori Sistem Hukum	11
1.5.1.2. Teori Sistem Peradilan Pidana	14
1.5.1.3. Teori Keadilan Proporsional	16
1.5.1.4. Teori Kepastian Hukum	22
1.5.2. Kerangka Konseptual	25
1.6. Sistematika Penulisan.....	26
BAB 2 LANDASAN TEORI.....	29
2.1. Konsepsi Penegakan Hukum di Indonesia	29
2.1.1. Konsepsi Penegakan Hukum di Indonesia	29
2.1.2. Penegakan Hukum.....	33
2.1.3. Hukum Acara Pidana Sebagai Instrumen Penegakan Hukum di Indonesia	37
2.2. Pengertian Persidangan Secara Elektronik.....	39
2.3. Konsepsi Mengenai Kondisi Tertentu Dalam Kaitannya Dengan Persidangan Secara Elektronik.....	42
2.4. Kewenangan Mahkamah Agung Membentuk Peraturan (PERMA)	45
BAB 3 METODOLOGI	49
3.1. Tipe Penelitian.....	50
3.2. Pendekatan Dalam Penelitian.....	51
3.3. Sumber Bahan Hukum	52
3.4. Metode Pengumpulan Bahan	55
3.5. Metode Analisis Data	56

BAB 4 HASIL PENELITIAN	58
4.1. Implementasi Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik Pada Masa Pandemi COVID-19	58
4.1.1. Hubungan COVID-19 dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik	58
4.1.2. Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik	61
4.1.3. Penerapan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Dalam Persidangan Secara Elektronik	64
4.1.4. Pengaturan Dalam PERMA No. 4 Tahun 2020 Beserta Perbandingannya KUHAP	69
4.1.4.1. Model Persidangan	69
4.1.4.2. Ruang Sidang	71
4.1.4.3. Prinsip Hadirnya Terdakwa dan Saksi Dalam Persidangan.....	72
4.1.5. Persidangan Elektronik Dalam Perkara No. 221/Pid.B/2021/ PN.Jkt.Tim dan Perkara No. 226/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim Dengan Terdakwa Mohammad Rizieq Shihab (MRS).....	75
4.1.6. Kelebihan dan Kekurangan Penerapan Sidang Secara Elektronik	79
4.1.6.1. Kelebihan	79
4.1.6.2. Kekurangan	81
4.2. Analisis Yuridis Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik.....	84
4.2.1. PERMA Sebagai Landasan Hukum Pelaksanaan Sidang Secara Elektronik.....	84
4.2.2. Kedudukan PERMA Dalam Peraturan Perundang-Undangan	86
4.2.3. Penerapan Persidangan Secara Elektronik di Negara Lain	88
4.2.4. Konsepsi Ideal Pengaturan Daftar Persidangan Secara Elektronik di Indonesia	91
 BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN.....	95
5.1. Kesimpulan.....	95
5.2. Saran.....	96
 DAFTAR PUSTAKA	97
RIWAYAT HIDUP	